

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoellah, Priyatmanto 2016, Revitalisasi Kewenangan PTUN; Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Basah, Sjachran 1997, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Cetakan Ke-3, Alumni, Bandung
- E.Utrecht, 1986, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus M. et.al., 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to the Indonesian Administrative Law, Cetakan Ke-10, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- _____, et. al, 2012 Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 2015, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta
- Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku I, Sinar Harapan, Jakarta
- Kompilasi Makalah Seminar IKAHI 2013-2019, 2019, Pengurus Pusat IKAHI. Tanpa Penerbit
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum, Kencana , Jakarta
- Manao, Disiplin F. 2017, Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Kreasi Sahabat Bersama, Bandung
- Marbun,S.F, Moh. Mahfud MD, 2011,Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta
- Minarno, Nur Basuki, 2010, Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama

- Muchsan, 1981, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta
- Permana, Tri Cahya Indra, 2016, Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadilli Pengadilan Tata Usaha Negara, Genta Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2018, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Ke-15, Rajawali Pers, Depok
- Simanjuntak, Enrico, 2018, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara; Transformasi dan Refleksi, Sinar Grafika
- Subur dkk, 2014, Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, Genta Press, Yogyakarta
- Suhendar, 2015, Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi, Setara Press, Malang
- Syamsuddin, Amir dkk, 2004, Putusan Perkara Akbar Tanjung; Analisis Yuridis Para Ahli Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soekanto, Soerjono 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
- Sumardjono, Maria SW, 2014, Bahan Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Tjandra, Riawan 2005, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Witanto, D.Y, 2012, Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pemerintahan barang/Jasa Instansi Pemerintah), Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung
- Wiyono, R, 2009, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

- Budi Suhariyanto, Penyelesaian Disparitas Putusan Pidana Terhadap “Kriminalisasi” Kebijakan Pejabat Publik, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume.18, No. 3, September 2018
- Enrico Simanjutak, Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2018
- Fathuddin, Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 01, Juni 2015
- Firna Novi Anggoro, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Number 4, Oktober -Desember 2016
- Philipus M. Hadjon, 2015, Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015
- Mohammad Sahlan, Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Pengadilan Administrasi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23, No. 2, April 2016
- Richo Andi Wibowo, Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2013
- Richo Andi Wibowo, When Anti Corruption Norms Lead To Underivable Results, Learning From Indonesia Experience, *Crime Law and Social Change*, November 2017
- Sudarsono, Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, *Tanjungpura Law Jurnal*, Volume 1, Issue 2, July 2017
- Syukron Salam, Gugatan Tersangka Terhadap BPKP: Gugatan Yang Salah Alamat dan Salah Kamar, *Jurnal Dictum*, Edisi 13, April 2019
- Tri Cahya Indra Pemana, Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Negara Ditinjau Dari Segi Access to Justice, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3, November 2015
- Yulius, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 Tahun 2015

D. Hasil Penelitian

Laporan Penelitian, 2014, Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik, Puslitbang Hukum dan Keadilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung,

Bram Mohammad Yasser, 2018, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Mathilda Crystina Katarina, 2018, Analisis Yuridis atas Permohonan Ada atau Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Peradilan Pidana, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Putri Ayu Prayogo, 2020, Pengujian Penyalahgunaan Wewenang di Peradilan Tata Usaha Negara, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang>

Kriminalisasi Serapan Anggaran, <https://koran.tempo.co/read/opini/381245/kriminalisasi-serapan-anggaran>,

“SBY Tolak Kriminalisasi Kebijakan Kasus Century”, <https://www.jpnn.com/news/sby-tolak-kriminalisasi-kebijakan-kasus-century>

“Pembuat Kebijakan diPidana”, <https://surabaya.tribunnews.com/2010/02/01/pembuat-kebijakan-dipidana>,

Presiden Tolak Kriminalisasi Kebijakan, <https://koran.tempo.co/read/188592/presiden-tolak-kriminalisasi-kebijakan>

UU Adpem Disahkan Tidak Ada Lagi Kriminalisasi Kebijakan, 24 September 2014 <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ruu-adpem-disahkan-tak-ada-lagi-kriminalisasi-kebijakan>,.

Syamsul Terancam Pidana Empat Tahun, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/07/12/145691/syamsul-terancam-pidana-empat-tahun>

Polda Tahan Empat Tersangka Korupsi Embung, lihat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/725460/polda-jambi-tahan-empat-tersangka-korupsi-embung>

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 15/P/PW/2016/PTUN/PLK

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 1/P/PW/2017/PTUN.JBI

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 2/P/PW/2017/PTUN.JBI

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 2/P/PW/2018/PTUN.PLK

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 5/P/PW/2018/PTUN.BKL

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 9/P/PW/2018/PTUN.SBY

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 167/B/PW/2018/PT.TUN.JKT

H. Lain-Lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Risalah sidang pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2016, acara mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon, Jakarta, Selasa 10 Mei 2016

Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Dalam Negeri Dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan, Nomor: 119 – 49 Tahun 2018, Nomor B-369/F/Fjp/02/2018, B/9/II/2018